ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DI KABUPATEN SIDOARJO BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010

Andik Setiawan
Amrina Yulfajar
STIE Mahardhika Surabaya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyajian laporan keuangan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan di Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo tahun 2015; (2) Penyajian Neraca Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo per 31 Desember 2015; (3) Penyajian Laporan Operasional (LO) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo tahun 2015; (4) Penyajian Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 dan (5) Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 sudah sesuai dengan acuan yang tercantum pada Lampiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010

Kata kunci : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua UU tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran. Pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggung jawaban menggunakan system akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah yang bersifat mengikat seluruh pemerintah daerah. Dalam sistem pemerintah daerah

terdapat dua subsistem, yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SPKPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun laporan keuangan SKPD. Oleh karena itu, setiap SKPD beserta jajaran dibawahnya harus menyusun laporan keuangan sebaik mungkin (Pajow dkk, 2015:770).

Standar akuntansi merupakan aturan utama yang harus diacu dalam penyajian laporan keuangan dalam kerangka prinsip akuntansi berlaku umum. Standar tersebut penting agar laporan keuangan lebih berguna, dapat dimengerti dan dapat diperbandingkan serta tidak menyesatkan. UU Nomor 1 Tahun 2004 menyebutkan arti penting Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga menyebutkan penyajian laporan keuangan pemerintah

daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Saat ini SAP yang berlaku adalah SAP berdasar PP Nomor 71 Tahun 2010 yang merupakan SAP berbasis akrual yang ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2010 (Halim dan Kusufi, 2012:227).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji analisis penyajian laporan keuangan pada dinas kebersihan dan pertamanan di kabupaten sidoarjo berdasarkan standar akuntansi pemerintah (SAP) menurut peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010.

TINJAUAN PUSTAKA

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pertama kali yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) adalah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 pada tanggal 13 Juni 2005. Inilah untuk pertama kali Indonesia memiliki standar akuntansi pemerintahan sejak Indonesia merdeka. Terbitnya SAP juga mengukuhkan peran penting akuntansi dalam pelaporan keuangan di pemerintahan. UU nomor 1 Tahun 2004 menyebutkan arti penting standar akuntansi pemerintahan dan memuat mengenai Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) sebagai penyusun SAP yang keanggotaannya ditetapkan dengan keputusan presiden.

Saat ini SAP menurut PP Nomor 24 tahun 2005 tidak berlaku dan diganti dengan SAP menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 yang merupakan SAP berbasis akrual yang ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2010. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, untuk para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan (Halim dan Kusufi, 2012: 226-227).

Basis akuntansi adalah perlakuan pengakuan atas hak dan

kewajiban yang timbul dari transaksi keuangan. Dalam akuntansi, dikenal adanya dua basis yaitu:

a. Basis Kas

Basis Kas adalah basis yang mengakui timbulnya hak atau kewajiban pada saat kas diterima atau dikeluarkan.

b. Basis Akrual

Basis akrual adalah basis yang mengakui adanya hak atau kewajiban pada saat perpindahan hak lepas dari saat kas diterima atau dikeluarkan.

SAP berbasis akrual menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 adalah SAP yang mengakui pendapatan-LO, beban, aset, hutang, dan ekuitas dalam pelaporan berbasis akrual, serta mengakui pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN atau APBD, yaitu basis kas. Jadi sebenarnya SAP tidak menganut basis akrual secara penuh tetapi basis modifikasian, yaitu akrual modifikasian (Halim dan Kusufi, 2012:228).

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

- e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan- pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar dapat digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Analisis deret waktu di dasrkan pada asumsi bahwa deret waktu tersebut terdiri dari komponen komponen Trend (T), Siklus/Cycle Laporan Perubahan

Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a) Ekuitas awal
- b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah /mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya: (1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; (2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d) Ekuitas akhir.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (Lampiran I.02 PSAP 01, PP No. 71 Tahun 2010:19-20)

Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional (LO) menyajikan beban akrual yang dapat digunakan untuk menghitung biaya per program atau kegiatan pelayanan. Beban-beban yang ada dalam Laporan Operasional dapat dikelompokkan menjadi biaya pegawai, biaya material, dan biaya overhead untuk melakukan perhitungan biaya untuk setiap program atau kegiatan. Dengan adanya Laporan Operasional dapat dihitung beban akrual dengan hasil/keluaran. Oleh karena itu, selain untuk menentukan biaya pelayanan, Laporan Operasional (LO) dapat juga untuk menilai kinerja pemerintah (Halim dan Kusufi, 2012:350).

Laporan finansial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional, Yaitu hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- b. Beban dari kegiatan operasional, Yaitu penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang dapat menurunkan ekuitas berupa pengeluaran aset atau timbulnya kewajiban.
- c. Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada
- d. Pos luar biasa, bila ada
- e. Surplus/defisit-LO.

Penambahan pos-pos, judul dan subtotal disajikan dalam laporan operasional jika standar ini mensyaratkannya, atau jika diperlukan untuk menyajikan dengan wajar hasil operasi suatu entitas pelaporan (PSAP 01, PP No. 71 Tahun 2010:18)

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan aset dalam aset lancar dan non lancarserta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (duabelas) bulan.

Apabila suatu entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti

persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos sesuai PSAP 01, PP No. 71 Tahun 2010:12.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran mengungkap kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus/Defisit-LRA
- e. Pembiayaan
- f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan (PSAP 01, PP No. 71 Tahun 2010:11)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, penelitian kualitatif menurut Moleong (2012:6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami

fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Sedangkan menurut Siregar (2015:8) metode deskriptif adalah menggambarkan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan.

Menurut Arikunto (2014:174) sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dalam penelitian ini, pemilihan sampel dilakukan menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* menurut Siregar (2015:33) adalah pemilihan sampel berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Dinas Kebersihan dan Pertamanan di Kabupaten Sidoarjo tahun 2015.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan (PSAP 01, PP No. 71 Tahun 2010:11)

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal

pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Apabila suatu entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos sesuai PSAP 01, PP No. 71 Tahun 2010:12.

Laporan operasional (LO) menyajikan beban akrual yang dapat digunakan untuk menghitung biaya per program atau kegiatan pelayanan. Beban-beban yang ada dalam Laporan Operasional dapat dikelompokkan menjadi biaya pegawai, biaya material, dan biaya overhead untuk melakukan perhitungan biaya untuk setiap program atau kegiatan. Dengan adanya Laporan Operasional dapat dihitung beban akrual dengan hasil/keluaran. Oleh karena itu, selain untuk menentukan biaya pelayanan, Laporan Operasional (LO) dapat juga untuk menilai kinerja pemerintah (Halim dan Kusufi, 2012:350)

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan keuangan yang menyajikan pos-pos:

- a) Ekuitas awal
- b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;

- c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah /mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya: (1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; (2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d) Ekuitas akhir.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (Lampiran I.02 PSAP 01, PP No. 71 Tahun 2010:19-20).

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajibankontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar dapat digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga

HASIL

Hasil Penelitian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015

Realisasi pendapatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 sebesar Rp1.423.997.000,00 dari anggaran

Rp.2.190.140.000,00 atau sebesar 65,02%. Realisasi belanja Dinas kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 sebesar Rp.178.343.943.279,20 dari anggaran sebesar Rp.219.447.296.897,00 atau 81,27%. Yang menjadi landasan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Hasil Penelitian Laporan Neraca Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015

Ringkasan Laporan Neraca Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Neraca Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Sidoarjo Per 31 Desember 2015

UR A I A N	TAHUN 2015
ASET	
Aset Lancar	10,546,574,386.00
Investasi Jangka Panjang	0.00
Aset Tetap	411,241,079,284.06
Aset Lainnya	10,909,023,786.93
JUMLAH ASET	432.696.677.456,99
KEWAJIBAN	101,783,510.00
Kewajiban Jangka Pendek	101,783,510.00
Kewajiban Jangka Panjang	0.00
EKUITAS	432,594,893,946,99
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	432,696,677,456,99

Sumber: Laporan Keuangan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015

Yang menjadi landasan dalam penyajian Neraca adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati

Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2015 tentang Sistem Akutansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Hasil Penelitian Laporan Operasional (LO) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015

Pendapatan LO merupakan hak Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Sidoarjo yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO selama tahun 2015 adalah sebesar Rp 1.423.997.000,00. Beban Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Sidoarjo tahun 2015 adalah sebesar Rp 121,784.774.242,05. Dari Pendapatan LO setelah dikurangi dengan beban maka diperoleh nilai surplus/defisit LO sebesar Rp (120.360.777.242,05).

Yang menjadi landasan dalam penyajian Laporan Operasional (LO) adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2015 tentang Sistem Akutansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo

Hasil Hasil Penelitian Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015

Realisasi Ekuitas Awal Tahun 2015 berasal dari Ekuitas Akhir pada Neraca 2014 setelah dilakukan restatement sebesar Rp 428,905,990,198.52. Surplus/defisit LO Tahun 2015 sebesar Rp (120.360.777.242,05) berasal Pendapatan LO sebesar Rp 1.423.997.000,00 dikurangi dengan beban sebesar Rp 121,784.774.242,05. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar Dinas kebersihan dan Pertamanan tahun 2015 Rp (52,870,265,288.68), sehingga

Ekuitas Akhir Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebesar Rp 432.594.893.946,99.

Yang menjadi landasan dalam penyajian Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2015 tentang Sistem Akutansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Hasil Hasil Penelitian Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015

Realisasi Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 merujuk pada Penmendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

- 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
- 2.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab III. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

- 3.1. Laporan Realisasi Anggaran
 - 3.1.1. Pendapatan - LRA
 - 3.1.2. Belanja
 - 3.1.3. Surplus/defisit LRA
- 3.2. Neraca
 - 3.2.1. Aset Lancar

- 3.2.2. Aset Tetap
- 3.2.3. Aset Lainnya
- 3.2.4. Kewajiban Jangka Pendek
- 3.2.5. Ekuitas Dana
- 3.3. Laporan Operasional
 - 3.3.1. Pendapatan - LO
 - 3.3.2. Beban
 - 3.3.3. Surplus/defisit LO
- 3.4. Laporan Perubahan Ekuitas
 - 3.4.1. Ekuitas Awal
 - 3.4.2. Surplus/Defisit LO
 - 3.4.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
 - 3.4.4. Ekuitas Akhir

Pembahasan

Kesesuaian Penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Dengan PP No. 71 Tahun 2010.

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 sudah sesuai dengan format laporan yang tercantum pada Lampiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010, tetapi untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) periode tahun sebelumnya belum dicantumkan karena penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual sesuai PP Nomor 71 tahun 2010 baru mulai dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo untuk tahun anggaran 2015 (sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013)

Kesesuaian Penyajian Laporan Neraca Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Dengan PP No. 71 Tahun 2010.

Penyajian Neraca Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo per 31 Desember 2015 sudah sesuai dengan format laporan yang tercantum pada Lampiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010,

tetapi Neraca Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 tidak disajikan secara komparatif dengan Neraca tahun 2014, karena terdapat perubahan basis akuntansi dari semula kas menuju akrual menjadi basis akrual yang merupakan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual sesuai PP Nomor 71 tahun 2010 baru mulai dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo untuk tahun anggaran 2015 (sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013).

Kesesuaian Penyajian Laporan Operasional (LO) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Dengan PP No. 71 Tahun 2010

Penyajian Laporan Operasional (LO) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 sudah sesuai dengan format laporan yang tercantum pada Lampiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010, tetapi Laporan Operasional (LO) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 tidak disajikan secara komparatif berikut nilai kenaikan/penurunan dan persentase kenaikan/penurunan dengan Laporan Operasional tahun 2014, karena penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual sesuai PP Nomor 71 tahun 2010 baru mulai dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo untuk tahun anggaran 2015 (sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013)

Kesesuaian Penyajian Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Dengan PP No. 71 Tahun 2010

Penyajian Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Dinas Kebersihan dan

Pertamanan Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 sudah sesuai dengan format laporan yang tercantum pada Lampiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010, tetapi Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 tidak disajikan secara komparatif dengan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) tahun 2014, karena penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual sesuai PP Nomor 71 tahun 2010 baru mulai dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo untuk tahun anggaran 2015 (sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013)

Kesesuaian Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Dengan PP No. 71 Tahun 2010

Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 sudah sesuai dengan acuan yang tercantum pada Lampiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010. Hanya saja pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 belum melakukan laporan rinci mengenai:

- 1) Domisili dan bentuk hukum entitas serta yurisdiksi dimana entitas tersebut beroperasi;
- 2) Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya;
- 3) Rincian hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Landasan Teori, Kerangka Berpikir, Analisis Hasil Penelitian, dan Pembahasan, maka

penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 sudah sesuai dengan format laporan yang tercantum pada Lampiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010
2. Penyajian Neraca Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo per 31 Desember 2015 sudah sesuai dengan format laporan yang tercantum pada Lampiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010.
3. Penyajian Laporan Operasional (LO) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 sudah sesuai dengan format laporan yang tercantum pada Lampiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010.
4. Penyajian Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 sudah sesuai dengan format laporan yang tercantum pada Lampiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010.
5. Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 sudah sesuai dengan acuan yang tercantum pada Lampiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010

SARAN

Saran-saran yang bisa disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo diharapkan untuk bisa konsisten dalam menerapkan penyajian Laporan Keuangan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, kekurangan-kekurangan yang masih terdapat di dalam penyajian Laporan Keuangan tahun 2015 diperbaiki lagi ditahun-tahun berikutnya sehingga tujuan laporan keuangan yaitu akuntabilitas, manajemen,

- transparansi, keseimbangan antargenerasi, dan evaluasi kinerja bisa terwujud dengan baik.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk bisa melakukan penelitian mengenai penerapan PP No. 71 Tahun 2010 di Kabupaten Sidoarjo ini tidak hanya pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan saja tetapi pada seluruh jajaran instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, sehingga bisa dijadikan kajian secara komprehensif dan menyeluruh mengenai evaluasi berikut kendala-kendala dalam penerapan PP No. 71 Tahun 2010 di Kabupaten Sidoarjo

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta
- Halim, Abdul dan Kusufi, Syam. 2012. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta
- Moleong, L.J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung, PT. Remaja Rosda Karya.
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2015 tentang Sistem Akutansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Siregar, Syofian. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Prenamedia Group. Jakarta.
- Taswan. 2014. *Akuntansi Perbankan Transaksi Dalam Valuta Rupiah (Edisi III) UPP STIM YKPN*. Yogyakarta

Jurnal

- Niu, Fitria Ayu Lestari, dkk. 2014. Analisis Penerapan PP. No. 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu. *Jurnal EMBA* Vol.2 No. 4 Desember 2014, Hal. 714-722.
- Pajow, Ria Valentina, dkk. 2015. Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA* Vol 3 No. 1 Maret 2015, Hal. 769-777.
- Rantung, Veronica. 2013. Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Dinas Perhubungan Kota Manado. *Jurnal EMBA* Vol. 1 No. 3 September 2013, Hal. 583-590.
- Skripsi, Tesis dan Disertasi
- Amalia, Rizka. 2016. Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada Laporan keuangan Badan Layanan Umum (Studi Kasus: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang). UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang.
- Stefani, Ifa Detri. 2014. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi pemerintahan Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan). Universitas Muhammadiyah Surakarta.